# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# (LKJIP)

## BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
## KABUPATEN KARANGANYAR
## TAHUN ANGGARAN 2017


**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**Alamat : Jalan K.H. Wakhid Hasyim Karanganyar**
**No. Telp./FAX. (0271) 495179 Kode Pos 57716**
**Website : www.baperlitbang.karanganyarkab.go.id**
**Email : baperlitbang_karanganyar@yahoo.com**

# DAFTAR ISI


**DAFTAR ISI** ..... i

**DAFTAR TABEL** ..... Ii

**KATA PENGANTAR** ..... iii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... I-1

**A. Latar Belakang** ..... I-1

**B. Susunan Organisasi** ..... I-2

**C. Tugas Pokok dan Fungsi** ..... I-2

**D. Aspek Strategis** ..... I-3

**BAB II PERENCANAAN KINERJA** ..... II-1

**A. Perencanaan Strategis** ..... II-1

**B. Visi Dan Misi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar** ..... II-1 II-2

**C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar** ..... II-2

**D. Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar** ..... II-5

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ..... III-1

**A. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar** ..... III-1

**B. Realisasi Anggaran** ..... III-14

**BAB IV PENUTUP** ..... IV-1

**LAMPIRAN**

1. **PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017**
2. **PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017**
3. **INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR**

## DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1.1 | Permasalahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar ……..…… | I-5 |
| Tabel 1.2 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ……. | I-8 |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar …… | II-3 |
| Tabel 2.2 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ……. | II-5 |
| Tabel 3.1 | Realisasi Anggaran Tahun 2017 Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar …..……. | III-14 |
| Tabel 3.2 | Perincian Alokasi Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 .. | III-17 |
| Tabel 3.3 | Perincian Alokasi Belanja Langsung Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 …….. | III-18 |

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 dapat disusun sesuai dengan petunjuk yang berlaku.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 ini adalah memberikan gambaran mengenai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar kepada Bupati.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Oleh sebab itu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 ini kami susun, semoga dapat bermanfaat.

Karanganyar, Desember 2017

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR**

**Drs. MUH. INDRAYANTO**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19610523 198603 1 010**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sistem dari Pembangunan Nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jatidiri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar memperhatikan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintah dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel (*good governance*).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dilakukan berdasarkan asas (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, (2) Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah, (3) Efisiensi, (4) Efektivitas, (5) Pembagian habis tugas, (6) Rentang kendali, (7) Tata kerja yang jelas dan (8) Fleksibilitas.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan daerah. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.

Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani sektor perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini BAPERLITBANG berkewajiban menyajikanLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, dan sebagai bahan masukan dan umpan balik bagi pihak- pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

## B. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

Susunan Pejabat struktural Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
    a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
    b. Kepala Sub Bagian Keuangan
    c. Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana
    a. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah
    b. Kepala Sub Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya
    a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan
    b. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial
    c. Kepala sub Bidang Pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
5. Kepala Bidang Ekonomi
    a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
    b. Kepala Sub Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi
6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program
    a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
    b. Kepala sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
    c. Kepala Sub Bidang Penyusunan Program

## C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 BAB III tentang Tugas dan Fungsi Pasal 4 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 BAB III tentang Tugas dan Fungsi Pasal 5, selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## D. Aspek Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Karanganyar sebagai

PERANGKAT DAERAH yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting di dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal di dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan evaluasi pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta hasil identifikasi permasalahan tahun-tahun sebelumnya, maka isu strategis di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 2013 – 2018, sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan. Posisi politik pemerintah (eksekutif) saat ini yang lemah jika dibandingkan dengan lembaga legislatif. Posisi demikian sering mengacaukan hasil perencanaan pembangunan.
2. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan belum adanya kesepahaman pengertian dan teknis penyusunan rencana di hampir semua Perangkat Daerah.
3. Mengendurnya semangat masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana.
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya berilaku nerabas (*shortcutting*).
5. Pada internal birokrasi, adanya lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah, rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan, rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).
6. Pada internal Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, belum mampu menyediakan alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik sumber daya manusia perencana, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologiinformasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
7. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten K00aranganyardiharapkan responsif, kreatif dan inovatif

agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan sampai tingkat desa, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kondisi yang harus dipersiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku
2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan
7. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
9. Tersedianya ketatalaksanaan perencanaan pembangunan

Mempelajari semua hal di atas, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar memilah permasalahan didasarkan pada kelompok - kelompok yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan. Berdasarkan pengamatan dan analisis, maka permasalahan strategis yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu yang berkaitan dengan kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, berkaitan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pelaksanaan Sinergitas Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat yang disusun oleh BAPPENAS dengan Program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar seperti tabel berikut :

Tabel 1.1.

Permasalahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Karanganyar

| **Kedudukan, Tugas dan Fungsi :** |
|---|
| 1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan. Posisi politik pemerintah (eksekutif) saat ini yang lemah jika dibandingkan dengan lembaga legislatif. Posisi demikian sering mengacaukan hasil perencanaan pembangunan.<br>2. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan belum adanya kesepahaman pengertian dan teknis penyusunan rencana di hampir semua Perangkat Daerah.<br>3. Mengendurnya semangat masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana.<br>4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya berilaku nerabas (*shortcutting*).<br>5. Pada internal birokrasi, adanya lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah, rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan, rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).<br>6. Pada internal Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, belum mampu menyediakan alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik sumber daya manusia perencana, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah. |
| **Bidang Penataan Ruang :** |
| 1. Belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah<br>2. Rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor<br>3. Masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang<br>4. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang |

| Pelaksanaan Sinergitas Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat yang disusun oleh BAPPENAS dengan Program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar : |
|---|
| 1. Masih terdapat Peraturan Perundang-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah<br>2. Keterbatasan kapasitas sumber daya perencana pembangunan di daerah<br>3. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah. |

*Sumber : Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten Karanganyar, 2014-2018*

Dengan menyesuaikan visi dan misi Bupati Karanganyar pada tahun 2014 - 2018 dan berdasarkan tugas serta fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, maka misi yang terkait adalah misi Bupati adalah :

1. Pembangunan Insfratruktur Menyeluruh

   Indikasi program yang dapat dilaksanakan untuk menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih, antara lain melalui :

   1) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur : yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan dan pembangunan gedung perkantoran, barang-barang inventaris serta kendaraan dinas.
   2) Program Pengembangan Data/Informasi ; program dalam rangka menyediakan data / informasi yang dibtuhkan baik untuk evaluasi maupun perencanaan pembangunan.
   3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Kegiatan –kegiatan pembuatan dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan.
   4) Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang memuat beberapa keigatn yang berkaitan dengan penyediaan dokumen perencanaan infrastruktur maupun penataan ruang.

2. Penciptaan 10.000 Wirausahawan Mandiri

   Indikasi program yang dapat dilaksanakan untuk menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih, antara lain melalui :

1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, melalui kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP), yaitu dengan pengembangan kewirusahaan dan peningkatan kesempatan kerja melalui pembinaan klaster Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mandiri dan terfasilitasinya kegiatan klaster binaan.
2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Kegiatan –kegiatan pembuatan dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan.

3. Pendidikan Gratis SD, SMP, SMA dan Kesehatan Gratis

   Indikasi program yang dapat dilaksanakan untuk menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih, antara lain melalui :

   1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Kegiatan –kegiatan pembuatan dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan.
   2) Program Perencanaan Sosial dan Budaya yang mencakup beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Diantaranya adalah Pendidikan Untuk Semua, Kabupaten Sehat, Bantuan KKN,

4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

   Indikasi program yang dapat dilaksanakan untuk menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih, antara lain melalui :

   1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, melalui kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP), yaitu dengan pengembangan kewirusahaan dan peningkatan kesempatan kerja melalui pembinaan klaster Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mandiri dan terfasilitasinya kegiatan klaster binaan.
   2) Program Perencanaan Sosial Budaya, melalui Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Infratruktur Perdesaan, Fasilitasi Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) / *Neighbourhood Development* (ND), TMMD.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya

   Indikasi program yang dapat dilaksanakan untuk menunjang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar terpilih, antara lain melalui :

a. Program Perencanaan Sosial Budaya, melalui Kegiatan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Hubungan antara Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel berikut ini :

Tabel. 1.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visi** | ***Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah*** | | |
| **Misi I** | **Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi** | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Mewujudkan sinkronisasi perencanaan nasional dan provinsi | Meningkatnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi | 1. Mengoptimalkan fungsi BAPERLITBANG yang sangat strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah | 1. Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan dan penyiapan bahan perencanaan, dokumen bidang penelitian, pengembangan dan statistik, bidang ekonomi, bidang social budaya dan bidang fisik dan prasarana |
| | | 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah | 2. Peningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sehingga tercipta perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi |
| | | 3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi | 3. Peningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi |
| **Misi II** | **Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua sektor pembangunan** | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan | 1. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam proses perencanaan | 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam | 1. Peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| daerah | pembangunan daerah | perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah | pembangunan daerah |
| | 2. Meningkatnya kesesuian antara dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah | 2. Memanfaatkan regulasi yang mengatur peran BAPERLITBANG di daerah untuk mengoptimalkan koordinasi BAPERLITBANG dengan Perangkat Daerah | 2. Peningkatan sinkronisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja BAPERLITBANG |
| | 3. Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah | | |
| | 4. Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen pelaksanaan pembangunan daerah | | |
| **Misi III Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang melingkupi semua sektor pembangunan** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup semua bidang pembangunan | 1. Meningkatnya ketersediaan hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral | 1. Meningkatkan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan | 1. Peningkatan kajian penelitian dan mengembangkan jaringan penelitian sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah |
| | 2. Meningkatnya peran database perencanaan dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan daerah | 2. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan | 2. Mengoptimalkan peran data base perencanaan bidang penelitian, pengembangan, bidang ekonomi, bidang social budaya dan bidang fisik prasarana dalam pengembangan data/informasi perencanaan pembangunan daerah |
| **Misi IV Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan.** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan | Memenuhi kebutuhan dan ketersediaan dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat mutu | Mengoptimalkan fungsi BAPERLITBANG yang sangat strategis untuk menghadapi intervensi politis, menyeleraskan | Peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan serta evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan rencana pembangunan baik jangka pendek (RKPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD) sehingga dapat |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | keterpaduan program antar Perangkat Daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan | menjadi feedback bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya |

*Sumber : Rencana Strategis Baperlitbang Kab.Karanganyar, 2014-2018*

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut di atas serta kajian kondisi dan situasi berdasarkan kajian kondisi dan situasi, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan. Posisi politik pemerintah (eksekutif) saat ini yang lemah jika dibandingkan dengan lembaga legislatif. Posisi demikian sering mengacaukan hasil perencanaan pembangunan.
2. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dengan Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan belum adanya kesepahaman pengertian dan teknis penyusunan rencana di hampir semua Perangkat Daerah.
3. Mengendurnya semangat masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana.
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya berilaku nerabas (*shortcutting*).
5. Pada internal birokrasi, adanya lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah, rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan, rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).
6. Pada internal Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, belum mampu menyediakan alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik sumber daya manusia perencana, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

## A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar di dalam merencanakan perencanaan menjadi tanggungjawab Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.

Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dalam periode Tahun 2014 – 2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 - 2018. Dalam penyusunannya memperhatikan aspek normative seperti diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun program dan kegiatan perencanaan di Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## B. Visi Dan Misi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

### 1. Visi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

Visi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, yaitu *“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Selaras, Terpadu, Menyeluruh Dan Berkelanjutan Dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah”.*

Yang dimaksud **Selaras** adalah **:** Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi.

Yang dimaksud **Terpadu** adalah **:** Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua bidang pembangunan.

Yang dimaksud **Menyeluruh** adalah **:** Perencanaan Pembangunan Daerah

yang mencakup semua bidang pembangunan.

Yang dimaksud **Berkelanjutan** adalah **:** Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

**2. Misi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar**

Visi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar selanjutnya dijabarkan ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, misi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi.
2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua sektor pembangunan.
3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang melingkupi semua sektor pembangunan.
4. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan.

## C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam waktu lima tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar. Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**
**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**
**Kabupaten Karanganyar**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE - | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| **Misi I** | **Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi** | | | | | | | |
| | Mewujudkan sinkronisasi perencanaan nasional dan provinsi | Meningkatnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi | Persentase koordinasi pada tahun berkenaan dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Misi II** | **Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua sektor pembangunan** | | | | | | | |
| | Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah | 1. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah | 1. Persentase kehadiran stakeholder (kelompok masyarakat) dalam proses perencanaan pembangunan daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 2. Meningkatnya kesesuian antara dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah | 2. Persentase kesesuaian penjabaran program RPJMD dalam RKPD | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% |
| | | 3. Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah | 3. Persentase kesesuaian penjabaran program RKPD dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 4. Meningkatnya | 4. Persentase | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE - | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| | | kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen pelaksanaan pembangunan daerah | kesesuian penjabaran program RKPD dalam kegiatan APBD tahun berkenaan | | | | | |
| Misi III | **Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang melingkupi semua sektor pembangunan** | | | | | | | |
| | Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup semua bidang pembangunan | 1. Meningkatnya ketersediaan hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral | 1. Jumlah hasil kajian perencanaan pembangunan disektor ekonomi, social budaya dan prasarana wilayah/tata ruang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 2. Meningkatnya peran database perencanaan dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan daerah | 2. Jumlah jenis fasilitas/ prasarana informasi guna mensosialisasi kan perencanaan pembangunan daerah | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis | 4 jenis |
| Misi IV | **Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan** | | | | | | | |
| | Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan | Memenuhi kebutuhan dan ketersediaan dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat mutu | Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersedia sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah | 7 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 5 jenis |

*Sumber : Rencana Strategis BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018*

## D. Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Kabupaten Karanganyar

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi suatu perangkat daerah.

Berikut ini adalah tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar terkait dengan visi dan misi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar:

**Tabel 2.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visi** | ***Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Selaras, Terpadu, Menyeluruh Dan Berkelanjutan Dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah*** | | |
| **Misi I** | **Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi** | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Mewujudkan sinkronisasi perencanaan nasional dan provinsi | Meningkatnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi | 1. Mengoptimalkan fungsi BAPERLITBANG yang sangat strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah | 1. Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan dan penyiapan bahan perencanaan, dokumen bidang penelitian, pengembangan dan statistik, bidang ekonomi, bidang social budaya dan bidang fisik dan prasarana |
| | | 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah | 2. Peningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sehingga tercipta perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi |
| | | 3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi | 3. Peningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi |

| Misi II | Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua sektor pembangunan | | |
|---|---|---|---|
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah | 1. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah | 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah | 1. Peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah |
| | 2. Meningkatnya kesesuian antara dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah | 2. Memanfaatkan regulasi yang mengatur peran BAPERLITBANG di daerah untuk mengoptimalkan koordinasi BAPERLITBANG dengan Perangkat Daerah | 2. Peningkatan sinkronisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja BAPERLITBANG |
| | 3. Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah | | |
| | 4. Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen pelaksanaan pembangunan daerah | | |
| **Misi III** | **Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang melingkupi semua sektor pembangunan** | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup semua bidang pembangunan | 1. Meningkatnya ketersediaan hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral | 1. Meningkatkan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan | 1. Peningkatan kajian penelitian dan mengembangkan jaringan penelitian sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah |
| | 2. Meningkatnya peran database perencanaan dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan daerah | 2. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan | 2. Mengoptimalkan peran data base perencanaan bidang penelitian, pengembangan, bidang ekonomi, bidang social budaya dan bidang fisik prasarana dalam pengembangan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | data/informasi perencanaan pembangunan daerah |
| **Misi IV Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan.** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan | Memenuhi kebutuhan dan ketersediaan dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat mutu | Mengoptimalkan fungsi BAPERLITBANG yang sangat strategis untuk menghadapi intervensi politis, menyeleraskan keterpaduan program antar Perangkat Daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan | Peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan serta evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan rencana pembangunan baik jangka pendek (RKPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD) sehingga dapat menjadi feedback bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya |

*Sumber : Rencana Strategis BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018*

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

Pencapaian kinerja Perangkat Daerah diukur melalui perbandingan realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, yang kemudian disusuli dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat pada awal Tahun 2017. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar 2014-2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

| NO | RENTANG CAPAIAN | KATEGORI CAPAIAN |
|---|---|---|
| 1. | Lebih dari 100 % | Baik Sekali (BS) |
| 2. | Lebih dari 75 % s.d 100 % | Baik (B) |
| 3. | 55 % s.d 75 % | Cukup (C) |
| 4. | Kurang dari 55 % | Kurang (K) |

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar secara umum telah dapat melaksanakan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014–2018 serta yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.

Berikut rincian pencapaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017.

1. Misi I Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar **"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi"**

   Dalam Misi Pertama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar terdiri dari satu Sasaran Strategis dan satu Indikator Kinerja dengan capaian di Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Th ke-4 (Th 2017) | Realisasi Th ke-4 (Th 2017) | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan sinkronisasi perencanaan nasional dan provinsi | Meningkatnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi | Persentase koordinasi pada tahun berkenaan dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi | % | 100 | 100 | 100 |

Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun ke-3 (Tahun 2016) | | | Tahun ke-4 (Tahun 2017) | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| Mewujudkan sinkronisasi perencanaan nasional dan provinsi | Meningkatnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan | Persentase koordinasi pada tahun berkenaan dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan pembangunan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nasional dan provinsi | daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi | | | | | | | |

Indikator pencapaian kinerja sasaran pada Misi Pertama adalah persentase koordinasi pada tahun berkenaan dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Pada tahun 2017 dengan target 100 persen tercapai realisasi 100 persen terlaksananya koordinasi pada tahun berkenaan (tahun 2017) dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Pencapaian tersebut sama dengan angka pencapaian di tahun 2016 (100 persen).

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

a. Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
b. Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar

Anggaran Tahun 2017 yang dipergunakan untuk pencapaian indkator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 160.766.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 96.821.136,- atau sebesar 60,22% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 39,78% atau sebesar Rp. 63.944.864,-
b. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 3.593.350,- atau sebesar 71,87% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 28,13% atau sebesar Rp. 1.406.650,-

2. Misi II Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar **“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua sektor pembangunan”**

Dalam Misi Kedua Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar terdiri dari empat Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja dengan capaian di Tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut :

a. Sasaran Pertama

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Th ke-4 (Th 2017) | Realisasi Th ke-4 (Th 2017) | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan keterpaduan perencanaan | Meningkatnya peran serta stakeholder | Persentase kehadiran stakeholder | % | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pembangunan daerah | dalam proses perencanaan pembangunan daerah | (kelompok masyarakat) dalam proses perencanaan pembangunan daerah | | | | |

Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun ke-3 (Tahun 2016) | | | Tahun ke-4 (Tahun 2017) | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah | Meningkatnya peran serta stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah | Persentase kehadiran stakeholder (kelompok masyarakat) dalam proses perencanaan pembangunan daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |

Indikator pencapaian kinerja sasaran strategis pertama pada Misi Kedua adalah persentase kehadiran stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2017 dengan target 100 persen tercapai realisasi 100 persen kehadiran stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian tersebut sama dengan angka pencapaian di tahun 2016 (100 persen).

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
b. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana

Anggaran Tahun 2017 yang dipergunakan untuk pencapaian indkator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 372.893.700,- atau sebesar 93,22% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 6,78% atau sebesar Rp. 27.106.300,-
b. Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 295.332.200,- atau sebesar 90,87% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 9,13% atau sebesar Rp. 29.667.800,-

b. Sasaran Kedua

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Th ke-4 (Th 2017) | Realisasi Th ke-4 (Th 2017) | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah | Meningkatnya kesesuian antara dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah | Persentase kesesuaian penjabaran program RPJMD dalam RKPD | % | 55 | 71,51 | 130,02 |

Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun ke-3 (Tahun 2016) | | | Tahun ke-4 (Tahun 2017) | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah | Meningkatnya kesesuian antara dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah | Persentase kesesuaian penjabaran program RPJMD dalam RKPD | 55 | 80.35 | 146 | 55 | 71.51 | 130 | Tercapai |

Indikator pencapaian kinerja sasaran strategis kedua pada Misi Kedua adalah persentase kesesuaian penjabaran program RPJMD dalam RKPD. Pada tahun 2017 dengan target 55 persen tercapai realisasi 71,51 persen kesesuaian penjabaran program RPJMD dalam RKPD atau 130,01 persen dari target yang telah ditetapkan. Meskipun melampaui target capaian, dengan angka target yang sama, capaian tersebut lebih kecil dibandingkan dengan capaian di tahun 2016 yaitu 80,35 persen (146 persen dari target capaian). Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2017 terdapat penyesuaian beberapa urusan yang sudah bukan menjadi kewenangan daerah, seperti urusan kehutanan pada tahun 2017 sudah menjadi urusan kewenangan Pemerintah Provinsi. Untuk urusan Ketahanan Pangan, dikarenakan Perangkat Daerah pelaksananya melebur ke dalam Dinas Pertanian dan Pangan, sehingga masalah Ketahanan Pangan masuk ke dalam Urusan Pertanian.

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan

a. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
b. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Anggaran Tahun 2017 yang dipergunakan untuk pencapaian indkator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 115.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 107.296.050,- atau sebesar 93,30% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 6,70% atau sebesar Rp. 7.703.950,-
b. Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 76.050.000,- atau sebesar 95,06% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 4,94% atau sebesar Rp. 3.950.000,-

c. Sasaran Ketiga

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Th ke-4 (Th 2017) | Realisasi Th ke-4 (Th 2017) | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah | Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian penjabaran program RKPD dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 |

Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun ke-3 (Tahun 2016) | | | Tahun ke-4 (Tahun 2017) | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah | Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian penjabaran program RKPD dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |

Indikator pencapaian kinerja sasaran strategis ketiga pada Misi Kedua adalah persentase kesesuaian penjabaran program RKPD dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2017 dengan target 100 persen tercapai realisasi 100 persen kesesuaian penjabaran program RKPD dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pencapaian tersebut sama dengan angka pencapaian di tahun 2016 (100 persen).

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Anggaran Tahun 2017 yang dipergunakan untuk pencapaian indkator kinerja tersebut adalah sebesar Rp. 115.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 107.296.050,- atau sebesar 93,30% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 6,70% atau sebesar Rp. 7.703.950,-

d. Sasaran Keempat

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Th ke-4 (Th 2017) | Realisasi Th ke-4 (Th 2017) | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah | Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen pelaksanaan pembangunan daerah | Persentase kesesuian penjabaran program RKPD dalam kegiatan APBD tahun berkenaan | % | 100 | 100 | 100 |

Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun ke-3 (Tahun 2016) | | | Tahun ke-4 (Tahun 2017) | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah | Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen pelaksanaan pembangunan daerah | Persentase kesesuian penjabaran program RKPD dalam kegiatan APBD tahun berkenaan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |

Indikator pencapaian kinerja sasaran strategis keempat pada Misi Kedua adalah persentase kesesuaian penjabaran program RKPD dalam kegiatan APBD tahun berkenaan. Pada tahun 2017 dengan target 100 persen tercapai realisasi 100 persen kesesuaian penjabaran program RKPD dalam kegiatan APBD tahun berkenaan. Dengan angka target yang sama, pencapaian tersebut sama dengan angka pencapaian di tahun 2016 (100 persen).

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Anggaran Tahun 2017 yang dipergunakan untuk pencapaian indkator kinerja tersebut adalah sebesar Rp. 115.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar

Rp. 107.296.050,- atau sebesar 93,30% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 6,70% atau sebesar Rp. 7.703.950,-

3. Misi III Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar **"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang melingkupi semua sektor pembangunan"**

Dalam Misi Ketiga Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar terdiri dari dua Sasaran Strategis dan dua Indikator Kinerja dengan capaian di Tahun 2017 dijabarkan sebagai berikut :

a. Sasaran Pertama

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Th ke-4 (Th 2017) | Realisasi Th ke-4 (Th 2017) | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup semua bidang pembangunan | Meningkatnya ketersediaan hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral | Jumlah hasil kajian perencanaan pembangunan disektor ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah/tata ruang | dokumen | 3 | 7 | 233,33 |

Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun ke-3 (Tahun 2016) | | | Tahun ke-4 (Tahun 2017) | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup semua bidang pembangunan | Meningkatnya ketersediaan hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral | Jumlah hasil kajian perencanaan pembangunan disektor ekonomi, social budaya dan prasarana wilayah/tata ruang | 3 dokumen | 4 dokumen | 133,33 | 3 dokumen | 7 dokumen | 233,33 | Tercapai |

Indikator pencapaian kinerja sasaran strategis pertama pada Misi Ketiga adalah jumlah hasil kajian perencanaan pembangunan disektor ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah/tata ruang. Pada tahun 2017 dengan target 3 dokumen tercapai 6 dokumen hasil kajian atau 200 persen dari target capaian. Dengan target capaian yang sama, capaian di tahun 2017 untuk sasaran strategis pertama misi ketiga ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 133,33 persen dari target capaian.

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui :

a. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan ;
   1) Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Karanganyar
   2) Studi Kelayakan Pembentukan Kawasan Minapolitan Kabupaten Karanganyar

3) Studi Keragaman Daur Ulang Limbah Organik dan Pemanfaatannya untuk Memperbaiki Sifat Fisik dan Biologi Tanah

b. Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan kegiatan :
   1) Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tubercolosis/TB
   2) Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah HIV/AIDS

c. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan
   1) Penyusunan Feasibility Study Pengembangan Wisata Waduk Gondang

d. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan :
   1) Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Jembatan Siwaluh

Anggaran Tahun 2017 yang dipergunakan untuk pencapaian indkator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
   1) Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Karanganyar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 195.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 169.307.400,- atau sebesar 86,82% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 13,18% atau sebesar Rp. 25.692.600,-
   2) Kegiatan Studi Kelayakan Pembentukan Kawasan Minapolitan Kabupaten Karanganyar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 54.900.000,- atau sebesar 99,82% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,18% atau sebesar Rp. 100.000,-
   3) Kegiatan Studi Keragaman Daur Ulang Limbah Organik dan Pemanfaatannya untuk Memperbaiki Sifat Fisik dan Biologi Tanah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 49.049.000,- atau sebesar 98,10% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,90% atau sebesar Rp. 951.000,-

b. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
   1) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tubercolosis/TB dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 42.314.000,- atau sebesar 84,63% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 15,37% atau sebesar Rp. 7.686.000,-
   2) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah HIV/AIDS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 32.573.750,- atau sebesar 93,07% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 6,93% atau sebesar Rp. 2.426.250,-

c. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1) Kegiatan Penyusunan Feasibility Study Pengembangan Wisata Waduk Gondang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 55.216.000,- atau sebesar 92,03% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 7,97% atau sebesar Rp. 4.784.000,-

d. Program Perencanaan Tata Ruang

1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Jembatan Siwaluh dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 58.623.000,- atau sebesar 97,71% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,29% atau sebesar Rp. 1.377.000,-

b. Sasaran Kedua

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Th ke-4 (Th 2017) | Realisasi Th ke-4 (Th 2017) | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup semua bidang pembangunan | Meningkatnya peran database perencanaan dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan daerah | Jumlah jenis fasilitas/ prasarana informasi guna mensosialisasi kan perencanaan pembangunan daerah | jenis | 4 | 4 | 100 |

Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun ke-3 (Tahun 2016) | | | Tahun ke-4 (Tahun 2017) | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mencakup semua bidang pembangunan | Meningkatnya peran database perencanaan dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan daerah | Jumlah jenis fasilitas/ prasarana informasi guna mensosialisasi kan perencanaan pembangunan daerah | 4 jenis | 4 jenis | 100 | 4 jenis | 4 jenis | 100 | Tercapai |

Indikator pencapaian kinerja sasaran strategis kedua pada Misi Ketiga adalah jumlah jenis fasilitas/ prasarana informasi guna mensosialisasikan perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2017 tercapai target 4 jenis fasilitas/prasarana informasi guna mensosialisasikan perencanaan pembangunan daerah atau mencapai 100 persen dari target capaian. Dengan angka target yang sama, pencapaian tersebut sama dengan angka pencapaian di tahun 2016 (100 persen). Empat jenis fasilitas/ prasarana informasi guna mensosialisasikan perencanaan pembangunan daerah tersebut antara lain berupa :

a. Papan Pengumuman

b. Leaflet
c. Pos Pengaduan
d. Pengumuman di mass media (website, radio daerah/swiba, surat kabar).

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan :
   1) Pemeliharaan Website BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar
c. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan :
   1) Sistem Informasi Pembangunan Daerah
d. Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan :
   1) Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA)

Anggaran Tahun 2017 yang dipergunakan untuk pencapaian indkator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 46.192.935,- atau sebesar 65,99% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 34,01% atau sebesar Rp. 23.807.065,-
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   1) Kegiatan Pemeliharaan Website BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100% dari pagu anggaran, sehingga tidak terjadi efisiensi anggaran.
c. Program Pengembangan Data/Informasi
   1) Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 71.855.200,- atau sebesar 95,81% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 4,19% atau sebesar Rp. 3.144.800,-
d. Program Kerjasama Pembangunan
   1) Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 90.370.850,- atau sebesar 95,13% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 4,87% atau sebesar Rp. 4.629.150,-

4. Misi IV Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar **“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan”**

Dalam Misi Keempat Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar terdiri dari satu Sasaran Strategis dan satu Indikator Kinerja dengan capaian di Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Th ke-4 (Th 2017) | Realisasi Th ke-4 (Th 2017) | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan | Memenuhi kebutuhan dan ketersediaan dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat mutu | Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersedia sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah | jenis | 5 | 5 | 100 |

Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun ke-3 (Tahun 2016) | | | Tahun ke-4 (Tahun 2017) | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan | Memenuhi kebutuhan dan ketersediaan dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat mutu | Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersedia sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah | 5 jenis | 5 jenis | 100 | 5 jenis | 5 jenis | 100 | Tercapai |

Indikator pencapaian kinerja sasaran strategis Misi Keempat adalah jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersedia sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2017 tercapai target 8 jenis jenis dokumen perencanaan yang tersedia sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah atau mencapai 100 persen dari target capaian. Dengan angka target yang sama, pencapaian tersebut sama dengan angka pencapaian di tahun 2016 (100 persen). Lima jenis dokumen perencanaan yang tersedia sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut antara lain berupa :

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
b. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
c. Rencana Kinerja Perangkat Daerah
d. KUA PPAS APBD Penetapan Tahun Rencana

e. KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Berjalan

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui :

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
   1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
   1) Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPD
   2) Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Rencana

Anggaran Tahun 2017 yang dipergunakan untuk pencapaian indkator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 162.024.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 144.954.000,- atau sebesar 89,46% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 10,54% atau sebesar Rp. 17.070.000,-
b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
   1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 372.893.700,- atau sebesar 93,22% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 6,78% atau sebesar Rp. 27.106.300,-
   2) Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 295.332.200,- atau sebesar 90,87% dari pagu anggaran, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 9,13% atau sebesar Rp. 29.667.800,-

## B. Realisasi Anggaran

**Tabel 3.1**
**Realisasi Anggaran Tahun 2017**
**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar**

| PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % | SISA ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **359.100.000** | **259.995.103** | **72,40** | **99.104.897** |
| a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.500.000 | 1.750.000 | 38,89 | 2.750.000 |
| b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | 70.000.000 | 46.192.935 | 65,99 | 23.807.065 |
| c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 52.000.000 | 39.400.000 | 75,77 | 12.600.000 |
| d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 25.000.000 | 21.215.000 | 84,86 | 3.785.000 |
| e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 10.000.000 | 9.430.000 | 94,30 | 570.000 |
| f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.800.000 | 5.800.000 | 100,00 | 0 |
| g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan | 1.800.000 | 450.000 | 25,00 | 1.350.000 |
| h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | 50.000.000 | 30.360.000 | 60,72 | 19.640.000 |
| i. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi keDalam dan ke Luar Daerah | 140.000.000 | 105.397.168 | 75,28 | 34.602.832 |
| **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **522.660.000** | **440.027.171** | **84,19** | **82.632.829** |
| a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 98.200.000 | 89.640.000 | 91,28 | 8.560.000 |
| b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 119.350.000 | 114.390.000 | 95,84 | 4.960.000 |
| c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 50.000.000 | 49.979.500 | 99,96 | 20.500 |
| d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas/ Operasional | 166.210.000 | 121.257.471 | 72,95 | 44.952.529 |
| e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | 18.000.000 | 8.799.018 | 48,88 | 9.200.982 |
| f. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 40.900.000 | 26.321.182 | 64,35 | 14.578.818 |
| g. Kegiatan Pemeliharaan Web Site BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 | 0 |
| h. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 20.000.000 | 19.640.000 | 98,20 | 360.000 |
| **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **22.450.000** | **21.140.000** | **94,16** | **1.310.000** |
| a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 22.450.000 | 21.140.000 | 94,16 | 1.310.000 |

| PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % | SISA ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **190.000.000** | **166.789.618** | **87,78** | **23.210.382** |
| a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 25.000.000 | 23.690.618 | 94,76 | 1.309.382 |
| b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana | 165.000.000 | 143.099.000 | 86,73 | 21.901.000 |
| **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **162.024.000** | **144.954.000** | **89,46** | **17.070.000** |
| a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | 162.024.000 | 144.954.000 | 89,46 | 17.070.000 |
| **Program Pengembangan Data/Informasi** | **195.000.000** | **178.478.150** | **91,53** | **16.521.850** |
| a. Kegiatan Sosialisasi APBD | 45.000.000 | 39.520.000 | 87,82 | 5.480.000 |
| b. Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah | 75.000.000 | 67.102.950 | 89,47 | 7.897.050 |
| c. Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja | 75.000.000 | 71.855.200 | 95,81 | 3.144.800 |
| **Program Kerjasama Pembangunan** | **205.000.000** | **190.918.700** | **93,13** | **14.081.300** |
| a. Kegiatan Koordinasi Kelitbangan | 110.000.000 | 100.547.850 | 91,41 | 9.452.150 |
| b. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) | 95.000.000 | 90.370.850 | 95,13 | 4.629.150 |
| **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** | **1.425.766.000** | **1.263.312.236** | **88,61** | **162.453.764** |
| a. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPD | 400.000.000 | 372.893.700 | 93,22 | 27.106.300 |
| b. Kegiatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah | 160.766.000 | 96.821.136 | 60,22 | 63.944.864 |
| c. Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana | 325.000.000 | 295.332.200 | 90,87 | 29.667.800 |
| d. Kegiatan Pengembangan E-Planning dan E-Budgeting | 260.000.000 | 236.172.300 | 90,84 | 23.827.700 |
| e. Keiatan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah | 115.000.000 | 107.296.050 | 93,30 | 7.703.950 |
| f. Kegiatan Penyusunan Indikator Makro | 75.000.000 | 70.984.900 | 94,65 | 4.015.100 |
| g. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar | 5.000.000 | 3.593.350 | 71,87 | 1.406.650 |
| h. Kegiatan Pelayanan Penerbitan Ijin Riset/Survey | 5.000.000 | 4.168.600 | 83,37 | 831.400 |
| i. Kegiatan Evaluasi RPJMD | 80.000.000 | 76.050.000 | 95,06 | 3.950.000 |
| **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi** | **580.000.000** | **552.384.904** | **95,24** | **27.615.096** |
| a. Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Karanganyar | 195.000.000 | 169.307.400 | 86,82 | 25.692.600 |
| b. Kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan | 230.000.000 | 229.302.904 | 99,70 | 697.096 |

| PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % | SISA ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Lapangan Kerja (FEDEP) | | | | |
| c. Kegiatan Studi Kelayakan Pembentukan Kawasan Minapolitan Kabupaten Karanganyar | 55.000.000 | 54.900.000 | 99,82 | 100.000 |
| d. Kegiatan Studi Keragaman Daur Ulang Limbah Organik dan Pemanfaatannya untuk Memperbaiki Sifak Fisik dan Biologi Tanah | 50.000.000 | 49.049.000 | 98,10 | 951.000 |
| e. Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Kegiatan Ekowisata Berbasis Masyarakat | 50.000.000 | 49.825.600 | 99,65 | 174.400 |
| **Program Perencanaan Sosial dan Budaya** | **650.000.000** | **583.193.527** | **89,72** | **66.806.473** |
| a. Kegiatan BOP pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Perguruan Tinggi | 160.000.000 | 140.036.652 | 87,52 | 19.963.473 |
| b. Kegiatan BOP Pereencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS | 85.000.000 | 79.217.550 | 93,20 | 5.782.450 |
| c. Kegiatan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) | 70.000.000 | 62.387.550 | 89,13 | 7.612.450 |
| d. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | 120.000.000 | 109.586.975 | 91,32 | 10.413.025 |
| e. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) | 80.000.000 | 71.204.350 | 89,01 | 8.795.650 |
| f. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RAD Penanggulangan TB/Tubercolosis | 50.000.000 | 42.314.000 | 84,63 | 7.686.000 |
| g. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya | 20.000.000 | 18.791.850 | 93,96 | 1.208.150 |
| h. Kegiatan fasilitasi Koordinasi Penyusunan Indikator SDGs | 30.000.000 | 27.080.850 | 90,27 | 2.919.150 |
| i. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RAD HIV/AIDS | 35.000.000 | 32.573.750 | 93,07 | 2.426.250 |
| **Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam** | **625.000.000** | **520.444.354** | **83,27** | **104.555.646** |
| a. Kegiatan Pendampingan *Water Resources & Irigations Sektor Management Program* (WISMP) | 67.348.500 | 54.222.950 | 80,51 | 13.125.550 |
| b. Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi / *Water Resources & Irigations Sektor Management Program* (WISMP) | 147.651.500 | 120.893.254 | 81,88 | 26.758.246 |
| c. Kegiatan Operasional Pokja AMPL Kabupaten Karanganyar | 120.000.000 | 87.059.105 | 72,55 | 32.940.895 |
| d. Kegiatan Operasional Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) | 80.000.000 | 60.340.295 | 75,43 | 19.659.705 |
| e. Kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RT3KP) | 150.000.000 | 142.712.750 | 95,14 | 7.287.250 |
| f. Kegiatan Penyusunan FS Pengembangan Wisata Waduk Gondang | 60.000.000 | 55.216.000 | 92,03 | 4.784.000 |
| **Program Perencanaan Tata Ruang** | **460.000.000** | **353.823.640** | **76,92** | **106.176.360** |

| PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % | SISA ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| a. Kegiatan Operasional BKPRD | 200.000.000 | 171.910.472 | 85,96 | 28.089.528 |
| b. Kegiatan Penyusunan Review KLHS RTRW Perubahan | 35.000.000 | 27.724.500 | 79,21 | 7.275.500 |
| c. Kegiatan Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Jembatan Siwaluh | 60.000.000 | 58.623.000 | 97,71 | 1.377.000 |
| d. Kegiatan Operasional Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Perubahan | 100.000.000 | 50.040.952 | 50,04 | 49.959.048 |
| e. Kegiatan Operasional Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKTKP) | 65.000.000 | 45.524.716 | 70,04 | 19.475.284 |
| **JUMLAH** | **5.397.000.000** | **4.675.461.403** | **86,63** | **721.538.597** |

*Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017, diolah*

Alokasi anggaran dalam mewujudkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 9.227.671.000,00** yang dialokasikan pada **belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.830.671.000,00** yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dan dialokasikan pada **belanja langsung sebesar Rp. 5.397.000.000,00** yaitu merupakan belanja pelaksanaan program dan kegiatan, adapun rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**
**Perincian Alokasi Belanja Tidak Langsung**
**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**
**Kabupaten KaranganyarTahun 2017**

| No | KelompokBelanja | Alokasi DPA (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belanja Pegawai / Personalia, yang terdiri dari :<br>a. Gaji dan Tunjangan<br>b. Tambahan Penghasilan PNS | <br>2.893.171.000,00<br>937.500.000,00 | <br>2.777.074.361,00<br>279.579.750,00 | <br>95,99<br>93,83 |
| | **Jumlah** | **3.830.671.000,00** | **3.656.654.111,00** | **95,46** |

*Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017, diolah.*

**Tabel 3.3.**
**Perincian Alokasi Belanja Langsung**
**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**
**Kabupaten KaranganyarTahun 2017**

| No | KelompokBelanja | Alokasi DPA (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Pegawai | 1.009.750.000,00 | 961.000.000,00 | 95,17 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.148.400.000,00 | 3.489.081.403,00 | 84,11 |
| 3 | Belanja Modal | 238.850.000,00 | 225.380.000,00 | 94,36 |
| | **Jumlah** | **5.397.000.000,00** | **4.675.461.403,00** | **86,63** |

*Sumber :Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017, diolah.*

# BAB IV

# PENUTUP

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani sektor perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Karanganyar. Pada Tahun Anggaran 2017, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar melaksanakan dua urusan yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Urusan Wajib) dan urusan Perencanaan (Urusan Penunjang), yang terbagi ke dalam 12 Program dan 60 kegiatan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja sasaran strategis dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator kinerja outcome yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
2. Capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 memperlihatkan hasil yang Baik Sekali, dengan capaian kinerja pengukuran Tahun 2017 rata-rata mencapai 120,42%.
3. Realisasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Langsung pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 sebesar 86,63%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya untuk mengatasi hambatan/kendala yang mungkin dihadapi, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan Rencana Kerja yang berisi program dan kegiatan serta target kinerja Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah sehingga tercipta konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
2. Perlunya perencanaan yang matang dan tepat berdasarkan analisis kebutuhan biaya, sehingga realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat maksimal.
3. Perlunya monitoring internal agar progress report dari pelaksanaan kegiatan dapat terpantau.

Karanganyar, 2017

**Mengetahui,**
**KEPALA BADAN PERENCANAAN**
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**Drs. MUH. INDRAYANTO**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19610523 198603 1 010**

# LAMPIRAN

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## (LKJIP)

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
**KABUPATEN KARANGANYAR**
**TAHUN ANGGARAN 2017**


**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
**KABUPATEN KARANGANYAR**
**Alamat : Jalan K.H. Wakhid Hasyim Karanganyar**
**No. Telp./FAX. (0271) 495179 Kode Pos 57716**
**Website : www.baperlitbang.karanganyarkab.go.id**
**Email : baperlitbang_karanganyar@yahoo.com**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan ankutabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MUH. INDRAYANTO

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Jabatan : BUPATI KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, Oktober 2017

**Pihak Kedua,**
**BUPATI KARANGANYAR**

**TTD**

**Drs. H. JULIYATMONO, M.M.**

**Pihak Pertama,**
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BAPERLITBANG

**Drs. MUH. INDRAYANTO**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19610523 198603 1 010**

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
# ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

**SKPD : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR**
**TAHUN : 2017**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Meningkatnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi | Persentase koordinasi pada tahun berkenaan dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi | 100% |
| 2 | Meningkatnya peran serta stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah | Persentase kehadiran stakeholder (kelompok masyarakat) dalam proses perencanaan pembangunan daerah | 100% |
| 3 | Meningkatnya kesesuian antara dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah | Persentase kesesuaian penjabaran program RPJMD dalam RKPD | 55% |
| 4 | Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian penjabaran program RKPD dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah | 100% |
| 5 | Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen pelaksanaan pembangunan daerah | Persentase kesesuian penjabaran program RKPD dalam kegiatan APBD tahun berkenaan | 100% |
| 6 | Meningkatnya ketersediaan hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral | Jumlah hasil kajian perencanaan pembangunan disektor ekonomi, sosial budaya dan prasarana wilayah/tata ruang | 3 dokumen |
| 7 | Meningkatnya peran database perencanaan dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan daerah | Jumlah jenis fasilitas/ prasarana informasi guna mensosialisasi kan perencanaan pembangunan daerah | 4 jenis |
| 8 | Memenuhi kebutuhan dan ketersediaan dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat mutu | Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersedia sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah | 5 jenis |

| | Program | | Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengembangan Data/Informasi | Rp. | 195,000,000.00 |
| 2 | Program Kerjasama Pembangunan | Rp. | 205,000,000.00 |
| 3 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. | 1,425,766,000.00 |
| 4 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Rp. | 580,000,000.00 |
| 5 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | Rp. | 650,000,000.00 |
| 6 | Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam | Rp. | 625,000,000.00 |
| 7 | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp. | 460,000,000.00 |
| 8 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 359,100,000.00 |
| 9 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Rp. | 522,660,000.00 |
| 10 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. | 22,450,000.00 |
| 11 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 190,000,000.00 |
| 12 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan | Rp. | 162,024,000.00 |
| | **Jumlah** | **Rp.** | **5,397,000,000.00** |

Karanganyar, Oktober 2017

**BUPATI KARANGANYAR**

**TTD**

**Drs. H. JULIYATMONO, M.M.**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR**

**Drs. MUH. INDRAYANTO**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 18610523 198603 1 010**

# PENGUKURAN KINERJA
# TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**SKPD : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR**
**TAHUN : 2017**

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| ***Misi I : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi*** | | | | |
| Meningkatnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi | Persentase koordinasi pada tahun berkenaan dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi | 100% | 100% | 100.00% |
| | | | | |
| ***Misi II : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mensinergikan semua sektor pembangunan*** | | | | |
| 1. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah | 1. Persentase kehadiran stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah | 100% | 100% | 100.00% |
| 2. Meningkatnya kesesuian antara dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah | 2. Persentase kesesuaian penjabaran program RPJMD dalam RKPD | 55% | 72% | 130.02% |
| 3. Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah | 3. Persentase kesesuaian penjabaran program RKPD dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100.00% |
| 4. Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan dokumen pelaksanaan pembangunan daerah | 4. Persentase kesesuian penjabaran program RKPD dalam kegiatan APBD tahun berkenaan | 100% | 100% | 100.00% |
| | | | | |
| ***Misi III : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melingkupi semua sektor pembangunan*** | | | | |
| 1. Meningkatnya ketersediaan hasil kajian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral | 1. Jumlah hasil kajian perencanaan pembangunan disektor ekonomi, social budaya dan prasarana wilayah/tata ruang | 3 | 7 | 233.33% |
| 2. Meningkatnya peran database perencanaan dalam mensosialisasikan perencanaan pembangunan daerah | 2. Jumlah jenis fasilitas/ prasarana informasi guna mensosialisasi kan perencanaan pembangunan daerah | 4 | 4 | 100.00% |
| | | | | |
| ***Misi IV : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melingkupi semua sektor pembangunan*** | | | | |
| Memenuhi kebutuhan dan ketersediaan dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat mutu | Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersedia sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah | 5 | 5 | 100.00% |
| **RATA-RATA CAPAIAN** | | | | **120.42%** |

**KEPALA BADAN PERENCANAAN**
**pPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
**KABUPATEN KARANGANYAR**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR ★ BAPERLITBANG

**Drs. MUH. INDRAYANTO**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19610523 198603 1 010**

# PENGUKURAN KINERJA UTAMA
# PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

Tugas Dan Fungsi :

A. Tugas

Tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 BAB III tentang Tugas dan Fungsi Pasal 4 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

B. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 115 Tahun 2016 BAB III tentang Tugas dan Fungsi Pasal 5, selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan.
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (formulasi pengukuran, tipe pengukuran, sumber data) |
|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| 1. | Meningkatnya peran serta stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah | Persentase kehadiran stakeholder (kelompok masyarakat) dalam Musrenbang | • Formulasi pengukuran : Jumlah stakeholder yang hadir dalam Musrenbang dibagi jumlah stakeholder yang diundang dalam Musrenbang dikali 100%<br>• Tipe perhitungan : Non Komulatif<br>• Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Karanganyar |
| 2. | Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1) Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD | • Formulasi pengukuran : Jumlah Variabel pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah variabel pada RPJMD dikali 100%<br>• Tipe perhitungan : Non Komulatif<br>• Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN (formulasi pengukuran, tipe pengukuran, sumber data) |
|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| | | | Karanganyar |
| 3. | Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan OPD | 2) Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD | • Formulasi pengukuran : Jumlah Variabel pada Renja OPD yang sesuai dengan RKPD dibagi jumlah variabel pada RKPD dikali 100%<br>• Tipe perhitungan : Non Komulatif<br>• Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Karanganyar |
| 4. | Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah | Persentase kegiatan dalam RKPD yang masuk dalam APBD | • Formulasi pengukuran : Jumlah kegiatan yang masuk ke dalam APBD dibagi jumlah kegiatan dalam RKPD dikali 100%<br>• Tipe perhitungan : Non Komulatif<br>• Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Karanganyar |
| 5. | Memenuhi kebutuhan dan ketersediaan dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat mutu | Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersedia sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah : 5 jenis dokumen | • Formulasi pengukuran : Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersedia<br>• Tipe perhitungan : Non Komulatif<br>• Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Karanganyar |

Karanganyar, Desember 2017

**Mengetahui,**
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR**

**Drs. MUH. INDRAYANTO**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19610523 198603 1 010**